



SIARAN PERS

Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2017

Kendari, 28 Mei 2018

Bertempat di Gedung DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara, pada hari Senin, tanggal 28 Mei 2018, Pukul 10:00 WITA dilaksanakan Rapat Paripurna Istimewa DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara dengan Agenda Penyerahan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara TA 2017 dari Badan Pemeriksa Keuangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara.

Penyerahan dilakukan oleh Auditor Utara Keuangan Negara I BPK (Pejabat Eselon I BPK) Bapak Dr. Heru Kreshna Reza kepada Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara Bapak H. Abdurrahman Shaleh, SH. MSi., dan Pj. Gubernur Sulawesi Tenggara Bapak Drs. H. Teguh Setyabudi, M.Pd. Kepada Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara TA 2017, BPK memberikan Opini “Wajar Tanpa Pengecualian”, perolehan Opini Wajar Tanpa Pengecualian atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara adalah untuk yang kelima kali secara berturut-turut.

Auditor Utara Keuangan Negara I BPK dalam sambutannya menyatakan bahwa Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara menunjukkan komitmen Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara beserta jajaran SKPD-nya terhadap kualitas laporan keuangan yang dihasilkan serta mampu menciptakan sinergi yang efektif terhadap seluruh pemangku kepentingan serta dukungan dari DPRD dalam pelaksanaan fungsi pengawasannya.

Namun masih terdapat hal – hal yang perlu mendapat perhatian, antara lain:

1. Penyajian dan Penatausahaan Kas pada BLUD RSUD Bahteramas belum tertib
2. Pengalihan kewenangan atas aset dari kabupaten / kota kepada provinsi belum tertib.
3. Pemanfaatan kekayaan daerah dilaksanakan belum sesuai ketentuan.
4. Pembayaran tunjangan profesi guru belum tertib.

Lebih lanjut Auditor Utara Keuangan Negara I BPK menyatakan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara untuk menyusun anggaran yang mendorong peningkatan kemakmuran, meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia, Pertumbuhan Ekonomi serta menekan nilai Pengangguran dan Memiskinan, karena pencapaian Opini “Wajar Tanpa Pengecualian” akan kurang bermakna jika kesejahteraan rakyat di Provinsi Sulawesi Tenggara belum tercapai.

BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara

Keterangan lebih lanjut:

Nur Kurniawan, Kepala Subbagian Humas dan TU Kalan
BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara
Email : stafhtukalansultra@gmail.com